



Published every April, August and December

JURNAL RISET AKUNTANSI & KEUANGAN

ISSN:2541-061X (Online). ISSN:2338-1507(Print). <http://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK>



Dewan Pengawas Syariah dan Pengungkapan Sukarela Pada Bank Umum Syariah di Indonesia

Elis Mediawati¹, Indria Fitri Afiyana²

Program Studi Akuntansi, FPEB, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia

Abstract. *This study aims to determine the influence of shariah supervisory board on the voluntary disclosure in shariah commercial bank in Indonesia during 2013 to 2016. The independent variable in this study is shariah supervisory board were measured by calculated all members of shariah supervisory board in that banks. The dependent variable is voluntary disclosure were measured by disclosure index. The method used in this research is descriptive and verification method with quantitative approach. Sources of data in this study was obtained from secondary data consists of the annual report of sharia commercial bank. By using simple regression analysis, the results of this study indicate that shariah supervisory board not influence the increase of voluntary disclosure on annual report significantly.*

Keywords: *Shariah Supervisory Board; Voluntary Disclosure; Shariah Commercial Bank*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dewan pengawas syariah terhadap pengungkapan sukarela di bank umum syariah di Indonesia selama tahun 2013 sampai 2016. Variabel independen dalam penelitian ini adana dewan pengawas syariah yang dihitung dengan menjumlahkan seluruh anggota dewan pengawas syariah di bank yang diteliti. Variabel dependen adalah pengungkapan sukarela yang dihitung dengan indeks pengungkapan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Sumber data pada penelitian ini diperoleh dari data sekunder yakni laporan tahunan bank umum syariah. Dengan menggunakan analisis regresi sederhana, hasil dari penelitian ini menemukan bahwa dewan pengawas syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan syariah pada laporan tahunan.

Kata Kunci: Dewan Pengawas syariah; Pengungkapan Sukarela; Bank Umum syariah

Corresponding author. Email : media_giri@yahoo.com¹. Email : indriafitri5@gmail.com²

How to cite this article. Mediawati, E., & Afiana, I. F. (2018). Dewan Pengawas Syariah dan Pengungkapan Sukarela Pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan Program Studi Akuntansi Fakultas Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia*, 6(2), 259-268. Retrived from <http://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK/article/view/12787>

History of article. Received: Mei 2018, Revision: Juli 2018, Published: Agustus 2018

Online ISSN: 2541-061X. Print ISSN: 2338-1507. DOI : 10.17509/jrak.v6i2.12787

Copyright©2018. Published by Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan. Program Studi Akuntansi. FPEB. UPI

PENDAHULUAN

Laporan tahunan merupakan sebuah informasi yang menjelaskan kondisi suatu entitas dan disusun untuk memenuhi kepentingan para pengguna dari laporan keuangan tersebut. Pada dasarnya, laporan tahunan pada lembaga manapun terbagi atas dua jenis pengungkapan, yakni pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela. Pengungkapan wajib adalah pengungkapan informasi yang harus diungkapkan oleh entitas yang diatur oleh peraturan suatu negara, sedangkan pengungkapan sukarela adalah pengungkapan informasi di luar yang diwajibkan oleh peraturan.

Jika kita melihat kerangka konseptual pada prinsip dasar akuntansi, sebenarnya setiap entitas dituntut untuk melakukan pengungkapan penuh, apalagi bank syariah yang mempunyai risiko yang lebih besar daripada bank konvensional karena terkait akad bagi hasil yang menghadapi ketidakpastian (Chapra dan Ahmed, 2008). Bila melihat dari konteks filosofis teori akuntansi syariah menurut Triyuwono (2006, hlmn. 321), salah satu prinsip dari akuntansi syariah adalah prinsip teologikal, dimana akuntansi bukan sekedar bertugas sebagai media pengambilan keputusan ekonomi, tetapi juga memiliki tujuan pertanggung jawaban kepada Tuhan, kepada sesama manusia, dan kepada alam semesta. Hal serupa juga diutarakan oleh Baydoun dan Willet (1994 dalam Triyuwono 2006) yang mengatakan bahwa tujuan dasar laporan keuangan akuntansi syariah yang bersifat "materi" adalah untuk pemberian informasi, sedangkan yang bersifat "spirit" adalah bentuk pertanggung jawaban.

Konsep tauhid dalam Islam merupakan hal yang sangat penting. Orang-orang yang beriman percaya bahwa segala yang ada di langit dan di bumi merupakan milik Allah. Maka dari itu, orang-orang beriman diwajibkan untuk bertanggung jawab atas semua hal yang Allah berikan kepada hamba-Nya (Baydoun dan Willet, 1997 dalam Ousama dan Fatima, 2010). Salah satu bentuk pertanggungjawaban dari lembaga adalah

mereka harus mengungkapkan informasi kepada masyarakat, dimana menurut Haniffa dan Hudaib (2002 dalam Ousama dan Fatima, 2010) fungsi dari pengungkapan ini tidak hanya sebagai sarana pengambilan keputusan ekonomi, tetapi juga keputusan yang bersifat religius.

Bagi bank syariah, prinsip pengungkapan ini tidak cukup pada pengungkapan wajib saja. Mengambil hukum taklifi, ada lima hukum dalam Islam, yaitu wajib, sunah, makruh, haram, dan mubah yang dalam penelitian ini kita hanya akan mengambil hukum wajib dan Sunnah (Zahrah, Hukum Taklifi, 2012). Jika dianalogikan kepada hal pengungkapan dalam akuntansi, seharusnya bank syariah sebagai bank yang menjalankan prinsip syariah tidak hanya memberikan pengungkapan yang bersifat wajib saja, namun juga perlu melakukan pengungkapan sukarela. Walaupun memang tidak wajib, sudah seharusnya bank syariah mengungkapkan informasi tambahan demi meningkatkan kepercayaan dari publik. Jika bank syariah mampu membangkitkan kepercayaan publik, maka ia akan lebih mampu berperan dalam mobilisasi dana, meningkatkan investasi, menciptakan lapangan kerja, membantu keuangan pemerintah dalam mengatasi defisit anggaran dan mempercepat pertumbuhan ekonomi, dimana hal-hal tersebut adalah hal yang saat ini menjadi kebutuhan mendesak bagi negara-negara muslim (Chapra dan Ahmed, 2008 hlmn, 3).

Salah satu penghargaan yang mengapresiasi prinsip keterbukaan informasi di lembaga adalah Annual Report Award yang terselenggara atas kerja sama Otoritas Jasa Keuangan, Kementrian BUMN, Bank Indonesia, Dirjen Pajak, Komite Nasional Kebijakan Governance, PT Bursa Efek Indonesia, dan Ikatan Akuntan Indonesia. Pada Bulan September 2017 telah terselenggara Annual Report Award 2016 yang diikuti oleh sebelas kategori lembaga, baik itu lembaga keuangan maupun non keuangan, adapun nama-nama pemenang Annual Report Award 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Pemenang *Annual Report Award 2016*

Kategori Perusahaan	Peringkat 1	Peringkat 2	Peringkat 3
BUMN Keuangan Listed	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	PT Sarana Multigriya Financial (Persero)
BUMN Non Keuangan Listed	PT Aneka Tambang (Peesero) Tbk	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
BUMN Keuangan Non Listed	PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero).	Perum Jaminan Kredit Indonesia	PT ASABRI (Persero)
BUMN Non Keuangan Non Listed	Perum Percetakan Uang Republik Indonesia	PT Bio Farma (Persero).	PT Nindya Karya (Persero)
Private Keuangan Listed	PT Bank CIMB Niaga Tbk	PT Bank Victoria International Tbk	PT Bank QNB Indonesia Tbk
Private Non Keuangan Listed	PT AKR korporibdo Tbk	PT Indo Tambangraya Megah Tbk	PT Unilever Indonesia Tbk
Private Keuangan Non Listed	PT Bank Mandiri Taspen Pos	PT Tugu Pratama Indonesia	PT Bank Sahabat Sampoerna
Private Non Keuangan Non Listed	PT Semen Tonasa	PT Pupuk Kalimantan Timur	PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia
BUMD Listed	PT BPD Jawa Barat dan Banten	PT BPD Jawa Tengah	PT Bank DKI
BUMD Non Listed	PT BPD Sumsel Babel	PT Mass Rapid Transit Jakarta	PT BPD Kalimantan Selatan
Dana Pensiun	Dapen Telkom	Dapen Bank Mandiri	Dana Pensiun Perkebunan

Sumber: <http://bisnis.liputan6.com> (data diolah)

Dari tabel di atas, kita menemukan tidak ada bank syariah yang memenangkan kategori di *Annual Report Award*. Padahal seharusnya bank syariah harus mementingkan aspek pengungkapan, karena menurut Triyuwono (2006, hlmn. 321), akuntansi bukan sekedar bertugas sebagai media pengambilan keputusan ekonomi, tetapi juga memiliki tujuan pertanggung jawaban kepada Tuhan, kepada sesama manusia, dan kepada alam semesta.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ariffin et. al. (2005), transparansi pada bank syariah di empat belas negara termasuk Indonesia, menemukan bahwa transparansi pada bank syariah masih kurang terkait dengan risiko pengungkapan atau disclosure. Padahal

menurutnya, kurangnya praktik pengungkapan dapat mengurangi fungsi pengendalian internal serta meningkatkan kemungkinan risiko ketidak hati-hatian dari pihak manajemen.

Menurut penelitian lain yang dilakukan oleh Ali dan Tarmizi (2015) pengungkapan di bank syariah Indonesia sudah mulai meningkat, hanya saja titik berat pengungkapan lebih condong kepada kepentingan investor dan kreditur yang disebabkan kurangnya pengetahuan akan keputusan yang akan diambil oleh pihak lain selain investor dan kreditur. Hal ini selaras dengan pendapat Belkaoui (2011 hlm. 331), dimana prinsip kewajaran dalam akuntansi meminta adanya perluasan dari pengungkapan akuntansi konvensional untuk mengakomodasi

seluruh pihak lain yang berkepentingan, termasuk di luar pihak investor dan kreditor. Inilah yang membuat tujuan pelaporan kepada pegawai, konsumen, maupun masyarakat

KAJIAN LITERATUR

Agency Theory

Menurut Jensen dan Meckling (1976) “agency theory menggambarkan manajemen sebagai agen yang lebih banyak tahu tentang perusahaan bisa memanfaatkan posisinya tersebut untuk kepentingan dirinya sendiri”. Sebagai pihak agen, manajemen bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik, dan sebagai imbalannya, pihak agen akan memperoleh kompensasi sesuai kontrak yang telah dibuat. Solusi untuk mengurangi kemungkinan konflik, dibuatlah mekanisme corporate governance. Menurut Shleifer dan Vishny (1977), corporate governance berkaitan dengan bagaimana para investor mengendalikan manajer serta bagaimana investor yakin bahwa manajer akan memberikan keuntungan, tidak akan mencuri, menggelapkan atau menginvestasikan dana investasi yang telah ditanamkan kepada proyek-proyek yang tidak menguntungkan investor.

Signalling Theory

Pada awalnya signaling theory atau biasa disebut teori sinyal merupakan teori yang dikembangkan untuk masalah yang ada di pasar tenaga kerja. Pada akhirnya, teori sinyal ini bisa diaplikasikan ke semua jenis pasar yang memiliki masalah asimetri informasi (Morris, 1987). Menurut Richard D. Morris (1987), teori sinyal dikembangkan untuk menangani masalah asimetri informasi di perusahaan dengan cara meningkatkan pemberian sinyal informasi dari pihak yang memiliki informasi lebih kepada pihak stakeholder yang kurang memiliki informasi. Adanya Pemberian sinyal ini dapat mengurangi ketidakpastian mengenai prospek perusahaan yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kredibilitas dan kesuksesan perusahaan (Wolk et al., 2000).

umum sulit dirumuskan karena dianggap informasi yang berguna bagi investor dan kreditor juga berguna bagi pihak lain.

Dewan Pengawas Syariah

Dewan pengawas syariah memiliki fungsi penting dalam hal pengawasan prinsip syariah di suatu bank syariah, dimana dewan pengawas syariah bertugas memberi nasihat serta saran kepada dewan direksi ataupun pimpinan kantor cabang mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah. Dewan Pengawas Syariah juga memiliki fungsi sebagai mediator antara bank umum syariah dengan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam mengkomunikasikan masalah muamalah kontemporer di bank umum syariah yang memerlukan kajian fatwa dari DSN-MUI. (Ifham Solihin, 2008 hlmn. 31).

Pengungkapan Sukarela

Pengungkapan sukarela menurut Meek et.al (2007, hlmn. 94) merupakan pilihan bebas manajemen perusahaan untuk memberikan informasi akuntansi dan informasi lain yang relevan untuk pembuatan keputusan para pemakai laporan tahunan. Sepaham dengan Meek, Untari dan Budiasih (2014) juga mengatakan pengungkapan sukarela adalah mengungkapkan informasi yang dianggap perlu oleh perusahaan untuk diungkapkan yang melebihi dari yang diwajibkan.

Untuk mengukur tingkat pengungkapan sukarela, peneliti menggunakan metode indeks pengungkapan seperti yang dilakukan oleh Ousama dan Fatima (2010). Perhitungan indeks pengungkapan ini dilakukan dengan cara sebagai berikut: (1) Memberi skor untuk setiap item pengungkapan secara dikotomi, dimana jika suatu item diungkapkan diberi nilai satu dan jika tidak diungkapkan maka diberi nilai nol. (2) Skor yang diperoleh lalu dijumlahkan untuk mendapatkan skor total. (3) Menghitung indeks kelengkapan pengungkapan dengan cara membagi total skor yang didapat dengan total skor yang item yang seharusnya diungkapkan.

Semakin banyak butir yang diungkap, maka semakin tinggi pula skor yang diperoleh bank tersebut. Bank yang mendapat angka

indeks yang lebih tinggi menunjukkan bahwa perusahaan tersebut melakukan praktik pengungkapan lebih baik dibanding dengan bank lain.

Pengaruh Dewan Pengawas Syariah Terhadap Tingkat Pengungkapan Sukarela Bank syariah hadir untuk memenuhi kebutuhan umat Muslim akan aktivitas transaksi yang patuh akan aturan syariah (Syafii, 2001). Perbedaan prinsip good corporate governance di bank konvensional dengan bank syariah terletak pada kepatuhan syariah (sharia compliance) yang harus dipatuhi oleh entitas bank syariah. Sebenarnya, bank syariah lebih membutuhkan praktik good corporate governance ketimbang bank konvensional, karena bank syariah mempunyai potensi masalah agensi lebih besar daripada bank konvensional, dimana bank syariah bukan saja berhadapan dengan target meningkatkan modal pemilik saham, tetapi juga bank syariah harus memastikan bahwa setiap transaksi yang ia lakukan sesuai dengan kepatuhan syariah. (Archer et.al. 1998). Penelitian yang dilakukan oleh Chapra dan Ahmed (2008) membuktikan bahwa kepatuhan pada syariah merupakan faktor yang penting, terbukti dari hasil penelitiannya yang mengungkapkan bahwa depositor bank syariah di Negara Bahrain dan Sudan mau menarik depositonya bila terbukti bank melakukan tindakan yang melanggar syariat.

Fungsi pengawasan pada kepatuhan syariah ini diserahkan kepada Dewan Pengawas Syariah. IFSB juga mewajibkan Dewan Pengawas Syariah untuk bekerja sama dengan komite audit. Dalam teori agensi, salah satu cara untuk menghindari dari kemungkinan timbulnya konflik agensi adalah dengan menyelenggarakan pengawasan. Konflik agensi ini salah satunya adalah, adanya kemungkinan pihak agen menyembunyikan informasi dari pihak prinsipal sehingga dapat memungkinkan terjadinya asimetri informasi. Padahal jelas kita ketahui, bila terjadi asimetri informasi, maka bank akan mendapat risiko gharar (ketidak pastian) dimana gharar merupakan hal yang terlarang dalam Islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahman dan Bukair (2013) membuktikan bahwa ukuran dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan Corporate Social Responsibility. Penelitian yang dilakukan oleh Farook et.al. (2011) juga membuktikan bahwa ukuran dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan Corporate Social Responsibility. Selain itu, penelitian tentang pengaruh dewan pengawas syariah terhadap pengungkapan juga pernah dilakukan oleh Abdullah et.al (2015) yang membuktikan bahwa ukuran dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan corporate governance.

H1: Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan sukarela pada laporan tahunan bank umum syariah.

METODOLOGI PENELITIAN

Objek dalam penelitian ini adalah dewan pengawas syariah sebagai variabel X dan tingkat pengungkapan sukarela pada laporan tahunan bank umum syariah di Indonesia sebagai variabel Y. Subjek dalam penelitian ini adalah bank umum syariah di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berjumlah 13 Bank. (www.ojk.go.id). Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2012, hlmn 122). Teknik purposive sampling ini digunakan karena terdapat kriteria tertentu yang harus dipenuhi dan mendukung pengolahan data penelitian, yakni bank umum syariah yang mempublikasikan laporan tahunannya pada tahun 2013 hingga tahun 2016. Hasilnya terdapat 12 bank yang memenuhi kriteria dalam penelitian ini yakni Bank Muamalat Indonesia, Bank BRI Syariah, Bank Syariah Bukopin, Bank Panin Syariah, Bank BNI Syariah, Bank Victoria Syariah, BCA Syariah, Bank Mega Syariah, Bank

Syariah Mandiri, Bank Maybank Syariah, Bank Aceh Syariah, dan Bank Jabar Banten Syariah,

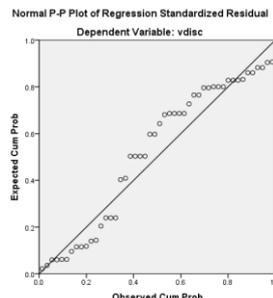
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah analisis dokumen untuk mengetahui data dari subjek penelitian. Dengan menganalisis dokumen, peneliti mengumpulkan dokumen berupa laporan tahunan dari situs resmi bank yang diteliti. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear sederhana.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat pengungkapan sukarela pada laporan tahunan bank umum syariah tahun 2013-2016. Variabel ini mengukur berapa banyak item pengungkapan laporan tahunan yang diungkapkan oleh bank umum syariah. Item pengungkapan sukarela ini berjumlah 50 item yang diambil dari item penilaian Annual Report Award 2015, penelitian terdahulu milik Ali dan Tarmizi (2015), Ho dan Wong (2001), Mohammed Hossain (2008), dan Obid dan Hajj (2011) dan telah disesuaikan dengan item pengungkapan wajib di Indonesia, yakni Surat Edaran OJK Nomor 18/SEOJK.03/2015 Tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah. Variabel independen dalam penelitian ini adalah dewan pengawas syariah yang dihitung dengan menjumlahkan seluruh anggota dewan pengawas syariah yang ada di bank yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

Secara teoritis, model regresi akan menghasilkan nilai parameter model penduga bila terpenuhi asumsi klasik regresi (Almilia dan Retrinasari, 2007). Uji asumsi klasik yang dilakukan yaitu uji normalitas, uji linearitas, dan uji autokorelasi. Hasil uji asumsi klasik adalah sebagai berikut: (1) Uji normalitas: untuk menguji normalitas, peneliti menggunakan metode P-Plot Regression. Data berdistribusi normal terlihat dari grafik yang menunjukkan titik-titik mendekati garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal.



Gambar 1. Hasil Uji Normalitas

(2) Uji Linearitas : untuk menguji linearitas, peneliti menggunakan metode *One-Sample Kolmogrov-Smirnov Test*. Dari uji tersebut, didapat nilai signifikansi sebesar 0.163, lebih besar dari 0.05 yang artinya data memiliki hubungan yang linear. (3) Uji Autokorelasi: untuk menguji autokorelasi, peneliti menggunakan metode uji *run-test*. Berdasarkan hasil *run test*, menunjukkan bahwa nilai *asympt. sig. (2-tailed)* adalah 0.667, lebih besar dari 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa residual random atau tidak terjadi autokorelasi antar nilai residual.

Analisis Regresi Sederhana

Analisis regresi linier sederhana adalah teknik regresi yang didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal satu variabel independen dengan satu variabel dependen (Sugiyono, 2012 hlm.270). Model persamaan regresi sederhana adalah:

$$\hat{Y} = a + bX$$

Keterangan:

\hat{Y} = Variabel dependen pengungkapan sukarela

X = Variabel independen dewan pengawas syariah

a = Konstanta (nilai \hat{Y} apabila X = 0)

b = Koefisien regresi variabel pengungkapan sukarela

Berdasarkan olah data dengan program SPSS IBM 20.0, didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 2
Hasil Regresi

Variabel	B	Sig	H ₁
Pengungkapan Sukarela	0.042	0.412	Ditolak
R Square	0.015		

Sumber: Output SPSS 20.0 data diolah 2017

Berdasarkan hasil uji regresi pada tabel 2 di atas, diketahui nilai koefisien regresi adalah sebesar 0.042, artinya terdapat hubungan positif antara variabel jumlah dewan pengawas syariah dengan tingkat pengungkapan sukarela. Nilai signifikansi sebesar $0.412 > \alpha 0.05$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, yang artinya, variabel dewan pengawas syariah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengungkapan sukarela. Hasil ini tidak sesuai dengan penelitian terdahulu milik Farook (2011), Abdullah et.al. (2015), dan Rahman dan Bukair (2013) yang mengungkapkan bahwa dewan pengawas syariah memiliki pengaruh signifikansi terhadap bahwa tingkat pengungkapan sukarela.

Peneliti juga melakukan uji koefisien determinasi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa besarnya *R Square* adalah sebesar 0.015, hal ini berarti jumlah dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan sukarela sebesar 1,5%. Sedangkan sisanya yakni 98,5% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model regresi ini.

Dalam bank umum syariah, dewan pengawas syariah memiliki peran penting dalam fungsi pengawasan terutama pengawasan terhadap kepatuhan syariah. Dalam teori agensi, salah satu cara untuk menghindari kemungkinan munculnya konflik agensi adalah dengan menyelenggarakan fungsi pengawasan. Konflik agensi yang bisa ditimbulkan diantaranya adalah adanya kemungkinan pihak agen menyembunyikan informasi untuk khalayak (Kelton dan Yang, 2008).

Ternyata penelitian ini tidak mendukung teori serta penelitian empiris yang menyatakan bahwa dewan pengawas syariah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengungkapan sukarela. Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian dari Rahman dan Bukair (2013), Farook et.al. (2011), serta Abdullah et.al (2015).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel

dewan pengawas syariah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengungkapan sukarela pada laporan tahunan bank umum syariah. Tidak seperti negara mayoritas Muslim lainnya, penelitian tentang dewan pengawas syariah dengan tingkat pengungkapan masih jarang dilakukan di Indonesia. Semoga penelitian ini bisa memacu minat peneliti lain khususnya di Negara Indonesia untuk melakukan lebih banyak penelitian di bidang akuntansi syariah.

Untuk penelitian selanjutnya, peneliti bisa meneliti variabel lain yang menurut teori dan penelitian empiris memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengungkapan, seperti dewan direksi, dewan komisaris, komite audit, rasio likuiditas, rasio leverage dan lain sebagainya guna meningkatkan khazanah ilmu baru khususnya di bidang akuntansi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Belkaidi, A.R. (2011). *Accounting Theory*. Jakarta: Salemba Empat.
- Iwan Triuwono. (2006). *Perspektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- M. Umer Chapra dan Habib Ahmed. (2008). *Corporate Governace Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Meek, G.K., Gernon, H. (2007). *Akuntansi Perspektif Internasional Edisi Kelima*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Solihin, A.I. (2008). *Ini Lho, Bank Syariah !*. Jakarta: Grafindo.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Syafii, A. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press
- Wolk, H. I., Francis, J. R., & Tearney, M. G. (2000). *Accounting Theory: A Conceptual and Institutional Approach*. Ohio: South Western College Publishing.
- Zahrah, P.M. (2012). *Hukum Taklifi Dalam Ushul Fiqih*. Jakarta: PT Pustaka Firdaus.

Jurnal

- Abdullah, W. A. W., Percy, M., & Stewart, J. (2015). Determinants of Voluntary Corporate Governance Disclosure: Evidence from Islamic Banks in the Southeast Asian and the Gulf Cooperation Council Regions. *Journal of Contemporary Accounting and Economics* 11(3), 1-14, <https://doi.org/10.1016/j.jcae.2015.10.001>
- Ali, M. H., & Tarmizi, A. (2015). Analisis Pengungkapan Sukarela Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 3(1), 5-20. <http://jurnal.sebi.ac.id/index.php/jaki/article/view/43>
- Almilia, L. S., & Retrinasari, I. (2007). Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Kelengkapan Pengungkapan Dalam Laporan Tahunan Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar DI BEJ. *Proceeding Seminar Nasional FE Universitas Trisakti*, 1-16, <https://spicaalmilia.files.wordpress.com/2008/08/penelitian-faktor-kelengkapan-pengungkapan.pdf>
- Archer, S., Karim, R. A. A., & Al-deehani, T. (1998). Financial contracting, governance structures and the accounting regulation of Islamic bank: an analysis in terms of agency theory and transaction cost economics. *Journal of Management and Governance*, 2, 149-170. <https://doi.org/10.1023/A:1009985419353>
- Ariffin, N. M., Archer, S. & Ahmed, R. (2005). Transparency and Market Discipline in Islamic Banks. *Proceeding of 6th International Conference on Islamic Economics and Finance*, 1(2), 153-174. <https://www.researchgate.net/publication/255453389>
- Farook S., Hassan K., & Lanis R.. (2011). Determinants of Corporate Social Responsibility Disclosure: The Case of Islamic Banks. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 2(2), 114-141, <https://doi.org/10.1108/17590811111170539>
- Ho, S. S. M., & Wong, K. S. (2001). A Study of the Relationship Between Corporate Governance Structure and The Extent of Voluntary Disclosure. *Journal of International Accounting, Auditing, and Taxation* 10(2001), 139-156. [https://doi.org/10.1016/S1061-9518\(01\)00041-6](https://doi.org/10.1016/S1061-9518(01)00041-6)
- Hossain, M. (2008). The Extent of Disclosure in Annual Reports of Banking Companies: The Case of India. *European Journal of Scientific Research*, 23(4), 660-681. <http://hdl.handle.net/10072/43289>
- Jensen, M. & Meckling, W. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost, and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3, 305-360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Kelton, A. S., & Yang, Y. W. (2008). The Impact of Corporate Governance on Internet Financial Reporting. *Journal of Accounting and Public Policy*, 27(2008), 62-87. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2007.11.001>
- Morris, R.D. (1987). Signalling, Agency Theory and Accounting Policy Choice. *Accounting and Business Research*, 18(69), 47-56. <http://dx.doi.org/10.1080/00014788.1987.9729347>
- Obid, S. N. S., & Hajj, A. F. (2011). Bank Ethical Disclosure Level: Malaysian Islamic Bank. *Asia Pasific Journal of Accounting and Finance*, 1(2), 199-210. <http://accounting.feb.ui.ac.id/apjaf/pub/pub2/8%20-%20paper%20-%20Obid%20and%20Haji.pdf>
- Ousama, A.A., & Fatima, A.H. (2010). Voluntary Disclosure by Shariah Approved Companies: an Exploratory

- Study. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 8(1), 35-49. <https://doi.org/10.1108/19852511011055943>
- Rahman, A. A., & Bukair, A. A. (2013). The Influence of the Shariah Supervision Board on Corporate Social Responsibility Disclosure by Islamic Banks of Gulf Co-Opeartion Council Countries. *Asian Journal of Business and Accounting* 6(2), 65-104. <https://www.researchgate.net/publication/281752644>
- Shleifer, A. & Vishny, R.W. (1997). A Survei of Corporate Governance. *The Journal of Finance*, 52(2), 737-783. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1997.tb04820.x>
- Untari, M.D.A, Budiasih, I.G.A.N. (2014). *Pengaruh konservatisme laba dan voluntary disclosure terhadap earnings response coefficient*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 7 (1), 1-18, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/8637>
- Sumber Online dan Bentuk Lainnya**
- Septian Deny (2017) 33 Perusahaan Sabet Penghargaan Annual Report Award ke-16 [online] diakses dari: <http://bisnis.liputan6.com/read/3101025/33-perusahaan-sabet-penghargaan-annual-report-awards-ke-16>
- Otoritas Jasa Keuangan (2017) Statistik Perbankan Syariah [online] diakses dari: www.ojk.go.id
- Otoritas Jasa Keuangan (2016) Kriteria Annual Report Award 2015 [online] diakses dari: www.ojk.go.id
- Peraturan-Peraturan**
- Surat Edaran OJK Nomor 18/SEOJK.03/2015 Tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah

